Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Mitro Subroto¹, Aliya Salma²

^{1,2} Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan
e-mail: subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA di Indonesia. Meskipun regulasi nasional dan internasional telah menjamin perlindungan hak-hak anak, implementasinya di LPKA masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi dalam artikel ini meliputi kondisi overkapasitas, keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga medis, serta ketidakterediaan orang tua dalam memberikan jaminan bagi program asimilasi anak. Selain itu, perbedaan persepsi mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan infrastruktur yang belum memadai juga menjadi penghalang dalam pemenuhan hak-hak anak. Artikel ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji berbagai faktor penghambat dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem peradilan dan perlindungan anak di LPKA. Kesimpulannya, meskipun upaya pemerintah sudah dilakukan, implementasi yang belum optimal menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut dalam hal sumber daya, fasilitas, dan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum terpenuhi secara maksimal.

Kata kunci: *Anak Berkonflik dengan Hukum, Pemenuhan Hak Anak, LPKA*

Abstract

This article discusses fulfilling the rights of children who are in conflict with the law at LPKA in Indonesia. Even though national and international regulations have guaranteed the protection of children's rights, their implementation in LPKA still faces many challenges. Some of the main obstacles identified in this article include overcapacity conditions, budget limitations, shortage of medical personnel, and the unavailability of parents in providing guarantees for children's assimilation programs. Apart from that, differences in perceptions regarding the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) and inadequate infrastructure also become obstacles in fulfilling children's rights. This article uses a literature study method to examine various inhibiting factors and provide recommendations for improving the justice and child protection systems in LPKA. In conclusion, despite the government's efforts, implementation that has not been optimal shows the need for further improvements in terms of resources, facilities and cross-institutional coordination to ensure that the rights of children in conflict with the law are maximally fulfilled

Keywords : *Children in Conflict with the Law, Fulfillment of Children's Rights, LPKA*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga, dibimbing dengan baik, serta diberikan kasih sayang, karena anak juga memiliki kehormatan, martabat, dan hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini penting agar di masa depan, anak tersebut dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. Anak adalah anugerah yang harus dijaga dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga dewasa, sehingga mampu berkontribusi secara berkelanjutan bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan perlindungan hukum dan hak-hak dasar anak terpenuhi, sebagai bagian dari generasi penerus yang diharapkan mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Annas, 2016). Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat bergantung pada peran generasi mudanya. Anak, sebagai bagian dari generasi

muda, akan melanjutkan perjalanan bangsa dan menentukan arah masa depannya, apakah akan menjadi negara yang maju dalam berbagai aspek atau justru menjadi negara yang tertinggal dan menghadapi berbagai krisis, seperti krisis ekonomi, moral, agama, pendidikan, dan hukum. Krisis-krisis ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kejahatan, korupsi, narkoba, pembunuhan, dan tindak pidana lainnya.

Anak-anak mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor di lingkungan mereka (Pradana et al, 2021). Pada tahap pencarian jati diri, psikologis anak sering kali rentan terhadap pengaruh dari kondisi dan situasi sekitarnya. Tidak dapat disangkal bahwa banyak anak di Indonesia terlibat dalam kasus hukum. Perilaku menyimpang pada anak sebagian besar dipicu oleh faktor lingkungan sosial tempat mereka tumbuh, faktor keluarga, dan juga ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak anak yang merupakan tanggung jawab negara (Ferdiawan et al (2020). Dalam instrumen Hak Asasi Manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional, anak dianggap sebagai kelompok masyarakat yang rentan dan memerlukan perlakuan khusus. Negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak istimewa anak tersebut. Kewajiban negara mencakup penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak-hak anak, baik kebutuhan fisik maupun psikologis, termasuk dalam aspek agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial, yang harus dijamin serta dilindungi (Nugroho,2017).

Ketika anak melanggar suatu norma hukum, maka anak ini dinamakan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Undang-undang ini mengatur secara keseluruhan mengenai sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar Anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh hak-hak dasar sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga dan menjamin perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum. Namun, permasalahan terkait pemenuhan hak-hak anak, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum, semakin meningkat, terlihat dari bertambahnya jumlah penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti apa saja yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

METODE

Metode yang digunakan adalah studi literatur atau tinjauan pustaka. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi literatur dan dokumen, yaitu literatur berupa buku-buku, artikel jurnal, ataupun jenis tulisan lainnya dan hasil kajian terhadap berbagai macam dokumen yang terkait dengan topik pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terkhusus anak yang berkonflik dengan hukum dan berbagai peraturan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan kasus anak berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pemenuhan hak-hak anak telah dijamin oleh berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak-hak bagi anak didik pasyarakat (Supeno, 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak berlandaskan pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak, yang mencakup:

1. Non diskriminasi diatur di dalam Pasal 2 KHA, yang selengkapnya menggariskan bahwa: Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak. Artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak diatur di dalam Pasal 3 KHA, yang menyatakan bahwa: Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan diatur di dalam Pasal 6 KHA yang mengatur bahwa "Negara-negara Pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan". Di mana unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak di dalam Pasal 12 KHA, maksudnya: penghormatan atas hak-hak berpartisipasi anak untuk dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut hal-hal jika yang mempengaruhi kehidupannya.

Sebagaimana diktum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), yang menyatakan bahwa Negara mengupayakan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karenanya Negara wajib mengupayakan :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Di Indonesia, Undang-undang yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) atau *Juvenile Criminal Justice System* yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu pada 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA) artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum. Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 3 UU SPPA ini disebutkan bahwa "Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi diperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. dipisahkan dari orang dewasa; secara
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional; manusiawi dengan
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak Anak Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan yaitu:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat

Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Overkapasitas

Over kapasitas menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di berbagai negara. Kondisi ini juga dialami oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Kepadatan hunian anak binaan di LPKA sangat memengaruhi pelaksanaan tugas, terutama dalam hal penyediaan layanan kesehatan dan makanan bagi warga binaan. Selain itu, kondisi over kapasitas juga berdampak pada pengawasan dan keamanan. Peningkatan jumlah anak binaan menuntut adanya peningkatan kebutuhan dan kualitas pengawasan. Akibatnya, keadaan LPKA yang melebihi kapasitas membuat pemenuhan hak-hak anak binaan tidak dapat terlaksana secara optimal.

2. Dana kesehatan yang terbatas

Keterbatasan dana menjadi salah satu kendala yang dihadapi LPKA dalam memenuhi hak-hak anak binaan. Dengan anggaran yang terbatas, program pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, dana yang minim juga menghambat pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan sangat bergantung pada anggaran yang disediakan oleh pemerintah sebagai pelaksana program pembinaan. Hal ini terbukti dari kurangnya fasilitas

yang tersedia di LPKA untuk mendukung kebutuhan sehari-hari anak binaan (Sugiyanto et al, 2022).

3. Kurangnya tenaga kesehatan

Keterbatasan dalam memenuhi hak kesehatan, serta kurangnya tenaga medis, menyebabkan layanan khusus di klinik kesehatan LPKA tidak dapat berfungsi dengan optimal. Anak binaan yang memerlukan penanganan khusus tidak dapat dilayani di klinik LPKA dan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun, proses rujukan bagi anak binaan yang sakit sering kali sulit dilakukan karena berbagai alasan, seperti masalah keamanan dan prosedur yang perlu diurus terlebih dahulu (Sugiyanto et al, 2022).

4. Ketersediaan orangtua terhadap hak asimilasi anak

Kendala utama dalam pelaksanaan program asimilasi bagi anak didik pemsyarakatan adalah ketidaksediaan orang tua untuk memberikan jaminan bagi anak mereka yang sedang menjalani hukuman. Hal ini terjadi karena orang tua merasa kewalahan dalam menghadapi anak tersebut, meskipun anak tersebut telah menunjukkan perubahan positif selama di Lembaga Pembinaan. Akibatnya, hak anak untuk memperoleh asimilasi menjadi terabaikan. Namun, Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap berupaya memenuhi hak asimilasi dengan mengalihkan jaminan kepada pihak ketiga, seperti LSM, yang bersedia memberikan jaminan untuk anak tersebut (Annas, 2016).

5. Terdapat perbedaan persepsi

Terdapat keragaman pandangan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penting adanya pemahaman yang jelas dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan anak agar hak-hak mereka tidak diabaikan. Banyaknya anak-anak yang belum ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang menunjukkan bahwa belum ada keselarasan persepsi mengenai anak dan hak-haknya (Eleanora & Masri, 2018).

6. Infrastruktur pendukung yang belum memadai

Infrastruktur pendukung seperti ruang tunggu anak, ruang penyidikan, ruang mediasi/diversi, dan ruang telekonferensi belum optimal, yang seharusnya penting untuk menjaga martabat anak di depan umum. Selain itu, masih terbatasnya fasilitas untuk rehabilitasi kasus anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga menjadi kendala (Eleanora & Masri, 2018).

SIMPULAN

Meskipun terdapat regulasi yang menjamin pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, implementasinya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa hambatan utama yang ditemukan meliputi overkapasitas LPKA, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga kesehatan, serta kesulitan dalam memenuhi hak asimilasi karena kurangnya partisipasi orang tua. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan belum maksimalnya infrastruktur pendukung di LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak sudah dilakukan, pemenuhan hak-hak anak binaan belum optimal dan memerlukan perbaikan di berbagai aspek, termasuk sumber daya, fasilitas, dan koordinasi antar lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, G. K. (2016). *Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215-230.
- Ferdiawan, R. P. F. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19-31.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemsyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 161-174.
- Pradana, J. M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Karakter Anak Terbentuk Berdasarkan Didikan Orang Tua dan Lingkungan Sekitar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7834-7840.

- Sugiyanto, S., Iriansyah, I., & Fahmi, F. (2022). Hambatan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 651-655.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak